



Pemkot Dorong Inovasi Layanan *Publik*

■ Yulianingsih

Pengurusan perizinan disatukan di Dinas Perizinan.

YOGYAKARTA - Tahun baru 2015 menjadi momentum untuk berbenah bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Sektor layanan publik menjadi fokus utama untuk ditingkatkan antara lain melalui inovasi di semua lini.

Berbagai terobosan layanan dan kelembagaan tengah digodok untuk diterapkan di 2015. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono menegaskan, tahun ini pihaknya fokus pada peningkatan layanan publik. "Kita sudah menyiapkan beberapa langkah dan kebijakan termasuk terobosan inovasi layanan untuk hal tersebut," ujarnya, saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (13/1).

Beberapa inovasi yang akan ditempuh pemkot untuk penguatan layanan publik antara lain penyatuan seluruh kepengurusan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Saat ini, kata dia, masih ada beberapa izin yang berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Izin tersebut antara lain izin praktik dokter yang masih di bawah Dinas Kesehatan dan izin penyelenggaraan

pendidikan di Dinas Pendidikan. "Izin-izin ini yang nanti akan kita jadikan satu di Dinzin sehingga masyarakat semakin mudah," ujarnya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian dan pemilahan izin-izin yang akan segera disatukan di Dinas Perizinan. Sebab, penyatuan kewenangan berimbang pada ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana. Sehingga kedua hal ini juga menjadi bahan kajian tersendiri.

Ditambahkan, seiring dengan penyatuan seluruh di satu dinas tersebut, Pemkot Yogyakarta juga tengah menggodok standar layanan publik yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap SKPD. Standar ini bukan hanya terkait sistem layanan semata, tetapi juga sikap, perilaku, dan sarana prasarana yang ada.

Standar layanan juga harus dilakukan di setiap kecamatan. "Standar ini termasuk sikap menerima tamu dan melayani masyarakat. Ini penting," ujarnya.

Pihaknya juga tengah mengkaji penyederhanaan syarat perizinan di Kota Yogyakarta. Menurut Kris Sarjono, saat ini syarat beberapa perizinan di Kota Yogya sangat banyak bahkan kadang dikeluhkan masyarakat. Dia mencontohkan kepengurusan perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP).

"Kenapa mengurus perpanjangan

harus menggunakan fotokopi, harusnya cukup menunjukkan KTP lama sudah cukup. Begitupula mengurus izin gangguan (HO) kenapa harus pakai fotokopi IMBB. Ini harusnya tidak perlu," ujarnya.

Untuk penyederhanaan syarat perizinan, menurutnya, basis data di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta harus lengkap. Karena, masyarakat nantinya cukup membawa kartu identitas saja untuk mengurus perizinan dan lainnya bisa diakses secara online di data Dinas Perizinan.

Untuk mewujudkan hal ini, sambung dia, dibutuhkan kerja sama dengan Bagian Teknologi Informasi Setda Kota Yogyakarta yang menyiapkan basis data tersebut. Terkait upaya itu, tahun ini beberapa lembaga di Kota Yogyakarta juga akan digabung dan ada yang dikembangkan.

Ini dilakukan untuk peningkatan peran masing-masing pihak dalam pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Salah satu penataan kelembagaan yang akan dilakukan adalah penggabungan penanaman modal masuk ke Dinas Perizinan, sehingga ke depan namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Selain itu, penggabungan Bidang Pertanian dari Dinas Perindustrian ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Untuk itu BLH ke depan akan men-

jadi dinas. Sementara Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan menjadi kantor.

Hal ini lantaran ULP semakin banyak melayani pengadaan secara elektronik (LPSE) lembaga lain bukan hanya Pemkot Yogyakarta sehingga harus menjadi struktur tersendiri agar bisa semakin dikembangkan.

Gandeng LAN

Pemkot Yogyakarta juga akan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menjadi Kota Inovasi. Pemkot Yogyakarta akan menjadi binaan LAN dalam penerapan berbagai inovasi layanan publik.

Pemkot Yogyakarta, kata dia, akan menjadi laboratorium inovasi pelayanan publik di Indonesia. Namun ke depannya, Kota Inovasi bukan hanya mengacu pada layanan publik semata namun semua hal terkait inovasi dalam masyarakat.

"Selama ini, pemkot sudah memiliki banyak inovasi layanan yang cukup membanggakan. Namun hal ini masih perlu dikemas lebih bagus dan semakin dikembangkan lagi," katanya.

Beberapa inovasi layanan publik yang sudah dilakukan Pemkot Yogyakarta antara lain, bimbingan belajar online oleh Dinas Pendidikan, UPT Tamanpintar, Penyatuan Perizinan di Dinas Perizinan, Rumah Pemulihan Gizi, dan Unit Pelaporan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemkot Yogyakarta.

Pemkot Yogyakarta pada 2015 ini juga akan mengajukan lima SKPD

untuk maju dalam penilaian zona integritas. Pada 2014 lalu, ada dua SKPD yang lolos dalam penilaian zona integritas di Kota Yogyakarta. Kedua SKPD ini adalah UPT Tamanpintar dan Dinas Perizinan.

Tahun ini akan ada lima SKPD yang menyusul, dua di antaranya dari kecamatan di Kota Yogyakarta. Selain memperkuat zona integritas, Pemkot Yogyakarta akan mengajukan 18 SKPD untuk ikut dalam kompetisi inovasi layanan publik yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPAN).

Sementara tahun lalu Pemkot Yogyakarta mengajukan lima SKPD dan hanya lolos dua dalam babak penyisihan 33 kabupaten/kota. Tahun ini diharapkan ada SKPD yang memenangkan kompetisi tersebut.

Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TTI) Kota Yogyakarta Sukadarisman mengatakan akan mendukung penuh upaya peningkatan layanan publik di Kota Yogyakarta melalui dukungan teknologi dan informasi.

"Tahun ini, kita akan membangun sarana internet gratis melalui jaringan wifi di semua ruang terbuka di Kota Yogyakarta. Melalui upaya ini masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi dan memberikan masukan pada Pemkot Yogyakarta melalui laman resmi milik pemkot," katanya.

Terkait penyiapan basis data pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Perizinan dan Bagian Organisasi untuk mendukung peningkatan layanan di Dinas Perizinan tersebut.

■ edi.yusuf.assidiq





Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Teknologi Informasi dan			
3. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005